



Judul : DPR Segera Kirim Delegasi Penghentian Genosida di Myanmar
Tanggal : Selasa, 31 Juli 2012
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

DPR Segera Kirim Delegasi Penghentian Genosida di Myanmar

Jakarta, Pelita

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera mengirimkan delegasi pertemuan dengan pimpinan parlemen Myanmar untuk mempersempit konflik dan menghentikan genosida atau pembersihan etnis Muslim Rohingya di Myanmar.

Demikian dijelaskan anggota Komisi I DPR yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Al Muzammil Yusuf di Jakarta, Senin (30/7), menanggapi laporan Badan Hak Asasi Manusia PBB (UN-HCR) bahwa pasukan keamanan Myanmar berada di balik upaya penghapusan entis Muslim Rohingya.

"Saya sudah sampaikan usulan ke Pimpinan Komisi I DPR dan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR untuk memutuskan pengiriman delegasi resmi DPR ke Myanmar pada sidang paripurna pasca reses ini, untuk memantau dan melobi parlemen Myanmar supaya mendesak Pemerintahnya menghentikan konflik yang berujung pada upaya genosida disana," ujar Al Muzammil.

Muzammil juga mendesak Presiden SBY agar segera mengambil sikap resmi terhadap persoalan ini melalui forum ASEAN karena dalam Piagam ASEAN disebutkan tujuan ASEAN adalah menjamin rakyat di bawah anggota negara ASEAN hidup damai di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.

"Kami meminta agar Presiden SBY, melalui Menteri Luar Negeri berperan aktif menyelesaikan persoalan etnis Rohingya di forum ASEAN secepatnya. Hal ini untuk menjaga agar kondisi kawasan kondusif dan konflik disana tidak meluas ke negara lain," pintanya.

Terpenting kata Muzammil, anggota negara ASEAN harus memastikan kekerasan yang terjadi di Myanmar berhenti dan Muslim Rohingya dijamin hak hidupnya dimanapun mereka berada.

"Selain itu, pengungsi Muslim Rohingya yang tersebar di negara anggota ASEAN harus dilindungi dan diupayakan untuk mendapatkan kewarganegaraan yang jelas di bawah koordinasi ASEAN," tutur Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen ini.

Indonesia paling toleran

Sementara Muslimat Nahdlatul Ulama menyalahkan terjadinya kekerasan terhadap kaum minoritas, muslim Rohingya di Myanmar. Apalagi, di negara tersebut terdapat tokoh HAM dan demokrasi, Aung San Suu Kyi yang memperoleh Nobel Perdamaian.

"Muslimat mengutuk terjadinya pembantaian, pengusiran dan tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Kekerasan itu sungguh ironi, karena terjadi di negara Aung San Suu Kyi yang meraih Nobel Perdamaian," tegas Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Khofifah, Muslimat NU mendesak Pemerintah Junta Militer Myanmar agar segera menghentikan segala bentuk pembantaian dan perilaku kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata Khofifah, sudah saatnya turun tangan untuk mengatasi masalah ini.

"Kami mendesak PBB dan lembaga-lembaga internasional lain segera melakukan langkah kongkret dalam mencegah berlanjutnya krisis kemanusiaan di Myanmar," kata dia.

Indonesia, lanjut Khofifah, juga harus berperan aktif dengan mengambil langkah kongkrit untuk membantu para korban kekerasan yang hingga saat ini masih membutuhkan pertolongan dari bangsa lain.

Selain itu, lanjut Khofifah, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim juga perlu menyuarakan solidaritas sesama muslim untuk memberikan pertolongan pada muslim Rohingya.

"Muslimat mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat memberikan bantuan baik secara materiil maupun moril sehingga etnis minoritas Muslim Rohingya dapat terlepas dari kezaliman Pemerintahan Junta Militer Myanmar," katanya.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan, kekerasan yang dialami muslim Rohingnya menjadi bukti, bahwa Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara yang sangat toleran kepada kelompok minoritas, tidak seperti yang dituduhkan PBB beberapa waktu lalu. (kh/ay)